BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*). Sebagai negara hukum, maka Indonesia selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hukum merupakan keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan dengan suatu sanksi. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, tetapi juga dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum maka hukum harus ditegakan.¹

Seseorang yang melakukan pelanggaran hukum atau telah melakukan suatu tindak pidana dan terbukti bersalah, maka harus dihukum sesuai dengan ancaman pidana yang terdapat dalam perundang undangan yang mengatur tentang tindak pidana tersebut. Dalam hal ini yang dimaksud dengan pidana ialah bentuk atau jenis sanksi yang dijatuhkan atau dikenakan kepada seseorang yang terbukti bersalah melakukan kejahatan atau tindak pidana.²

Hukum mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan perbuatan apa yang diharuskan atau yang dilarang oleh hukum itu

¹Mertokusumo, S. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1986, hlm. 37.

²Listiana, L., & Sudarti, E. (2021). Putusan Tentang Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1(1), 68-78. <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8372>.

sendiri. Dalam tatanan hukum yang berlaku di Indonesia terdapat beberapa macam hukum, antara lain hukum pidana dan hukum acara pidana. Kedua hukum tersebut mempunyai suatu hubungan yang erat, karena hukum pidana merupakan hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat dipidana, siapa saja yang dapat dipidana serta pidana apa saja yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Hal ini menempatkan hukum pidana dalam pengertian hukum pidana materiil, sedangkan hukum acara pidana berfungsi untuk menjalankan hukum pidana materiil sehingga disebut hukum pidana formil.³

Idealnya sebagai negara hukum, Indonesia menganut sistem kedaulatan hukum atas supremasi hukum yaitu hukum mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam negara. Sebagai negara hukum, Indonesia menganut salah satu asas yang penting yakni asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Asas yang demikian selain ditemukan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), juga dapat disimak dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dinyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Putusan pengadilan akan berdimensi kemanusiaan apabila berpijak kepada asas *equality before the law* dan *presumption of innocence*, karena kedua asas ini mengandung

³Yulya Neta, *Hukum ilmu Negara*, Universitas Lampung 2011, hlm. 2.

nilai-nilai Hak Asasi Manusia yang juga harus dilindungi dan diperhatikan oleh penegak hukum khususnya bagi hakim yang wewenang memutus perkara. Putusan pengadilan merupakan tonggak yang penting bagi cerminan keadilan, termasuk putusan pengadilan yang berupa penjatuhan pidana dan pemidanaan.

Hakim dalam menjatuhkan pemidanaannya, tentunya selain berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan (positif), juga mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, asas kemanfaatan, efektivitas dalam menjalankan pemidanaan dan perubahan perilaku yang menimbulkan efek jera pasca keluarnya dari lembaga pemasyarakatan. Hakim dalam putusannya tanpa mempertimbangkan aspek tersebut, akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan di dalam memberikan pidana. Hal tersebut nampak banyak terjadinya penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) dalam prakteknya di pengadilan. Kasus penerapan pidana tersebut menurut *Molly Cheang* sebagaimana dikutip oleh Muladi dinamakan disparitas putusan hakim atau dikenal dengan istilah disparitas hukuman (pidana) (*disparity of sentencing*).⁴

Tidak semua tindak pidana intensitas kerugian atau kerusakan yang ditimbulkannya sama. Oleh karenanya, hakim dalam menjatuhkan putusannya

⁴Kadri Husin & Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana DiIndonesia*, Lembaga penelitian Universitas Lampung, 2012, hlm. 81.

mengikuti prinsip keadilan, seberapa tinggi kerusakan atau kerugian yang ditimbulkannya.⁵

Terpidana setelah membandingkan antara pidana yang dikenakan kepadanya dengan yang dikenakan kepada orang-orang lain kemudian merasa menjadi korban (victim) dari ketidakpastian atau ketidakteraturan pengadilan akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu hasil yang ingin dicapai di dalam tujuan pemidanaan.⁶ 924 / Pid.B /2019 / PN.JMB Dengan Putusan hukuman pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan.

Dari putusan hakim tersebut semua pelaku dikenakan dengan Pasal 363 KUHP ayat (1) angka 3 dan 4, yaitu:

Pasal 363:

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
 1. pencurian ternak;
 2. pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
 3. pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
 4. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
 5. pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan

⁵Wicaksono, A. B., Haryadi, H., & Munandar, T. I. (2021). Fenomena Pencurian dengan Kekerasan di Masa Pandemi Covid 19: Mampukah Hukum Bekerja ?. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2(3), 85-94. <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i3.15778>.

⁶Naziva, D. N., Usman, U., & Rakhmawati, D. . (2021). Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor dengan Pemberatan dan Kekerasan. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2(3), 76-84. <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i3.16324>

merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

- 2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Dalam menjatuhkan Putusan, hakim tidak boleh diintervensi pihak manapun. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim juga wajib mempertimbangkan sifat baik dan jahat pada diri terdakwa

Pada dasarnya hakim mempunyai berbagai pertimbangan di dalam menjatuhkan berat ingannya pidana kepada terdakwa, diantaranya hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, baik yang terdapat di dalam maupun di luar undang-undang. Di antaranya yang terdapat di dalam Undang-Undang yaitu pada peringanan pidanaan, yaitu: pembantuan (*medeplichtige*) dalam Pasal 56 KUHP dan halhal yang memberatkan, yaitu perbarengan tindak pidana (*concurus*) dalam Pasal 63 sampai 71 KUHP.⁷

Di dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan sangatlah berbeda dengan jenis-jenis pencurian yang lain. Menurut KUHP, Pencurian pada umumnya diklasifikasikan menjadi 4 jenis, yaitu: pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian ringan dan pencurian dengan kekerasan. Masing-masing pencurian tersebut terdapat ketentuan yang berlainan dalam hal

⁷Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*, Cet.4, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 52.

pidanaannya. Namun, di sini yang penulis fokuskan hanya satu jenis pencurian saja, yaitu pencurian dengan pemberatan. Disparitas yang ingin penulis teliti ialah perbedaan yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan.⁸

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengangkatnya kedalam sebuah penelitian guna penyusunan skripsi yang diberi judul: **ANALISIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 924/PID.B/2019/PN.JMB.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan Pasal 363 ayat (1) angka 4 dan 5 KUHP terhadap Pelaku Pencurian dengan Pemberatan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku pencurian dengan pemberatan berdasarkan Putusan Nomor 924/PID.B/2019/PN.JMB?

⁸Nurroffiqoh, N., Liyus, H. ., & Prayudi, A. A. . (2022). Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan .*PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 3(1), 85-102. <https://doi.org/10.22437/pampas.v3i1.17706>.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis yang menjadi dasar dalam penerapan Pasal 363 ayat (1) angka 4 dan 5 KUHP terhadap Pelaku Pencurian dengan Pemberatan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku pencurian dengan pemberatan berdasarkan Putusan Nomor 924/PID.B/2019/PN.JMB.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pendapat atau manfaat bagi pengembangan hukum di Indonesia yang berkenaan dengan penjatuhan sanksi Pasal 363 ayat (1) angka 4 dan 5 KUHP terhadap Pelaku Pencurian dengan Pemberatan.

b. Manfaat secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi alternatif pemecahan masalah yang timbul dewasa ini, berkaitan dengan Pasal 363 ayat (1) angka 4 dan 5 KUHP terhadap Pelaku Pencurian dengan Pemberatan

D. Kerangka Konseptual

Untuk mengetahui maksud judul skripsi ini haruslah diketahui pengertian masing-masing kata yang terdapat dalam judul adalah sebagai berikut :

1. Tindak Pidana

Menurut Moeljatno berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut beliau yang diistilahkan sebagai perbuatan pidana adalah: “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.”⁹

2. Pelaku tindak pidana.

Definisi pelaku menurut KUHP dirumuskan dalam Pasal 55 ayat 1 yaitu: “dipidana sebagai tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, dan mereka yang sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.”

3. Pencurian dengan pemberatan

Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi : “barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara

⁹Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana* Bagian 1. Jakarta. Penerbit Raja Grafindo Persada. 2010. hlm. 71.

paling lama 5 Tahun atau denda paling banyak Rp.900,00,-“. Untuk lebih jelasnya, apabila dirinci rumusan itu terdiri dari unsur-unsur objektif (perbuatan mengambil, objeknya suatu benda, dan unsur keadaan yang melekat pada benda untuk dimiliki secara sebagian ataupun seluruhnya milik orang lain) dan unsur-unsur subjektif (adanya maksud, yang ditujukan untuk memiliki, dan dengan melawan hukum). Delik pencurian dengan pemberatan pada dasarnya berbeda dengan pencurian biasa (Pasal 362 KUHP). Istilah pencurian dengan pemberatan ini digunakan oleh R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Karena sifatnya, maka pencurian itu diperberat ancaman pidananya. Pencurian jenis ini dinamakan juga pencurian dengan kualifikasi (*gequalificeerd diefstal*) yaitu “pencurian dengan pemberatan”, sebab dari istilah tersebut sekaligus dapat dilihat bahwa, karena sifatnya maka pencurian itu diperberat ancaman pidananya.¹⁰

E. Landasan Teoretis

1. Teori Pidanaan.

Teori pidanaan dapat digolongkan dala tiga golongan pokok yaitu golongan teori pembalasan, golongan teori tujuan, dan golongan teori gabungan.

a. Teori Pembalasan

¹⁰Koeswadji, Hermien Hadiati dkk. *Delik Harta Kekayaan, Asas-asas, Kasus dan Permasalahannya*. Cet. I. PT Sinar Jaya, Surabaya, 1985, hlm. 11.

Teori pembalasan atau juga bisa disebut dengan teori absolut adalah dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi orang lain maka sipelaku kejahatan pembalasannya adalah harus diberikan penderitaan juga.² Teori pembalasan ini menyetujui pembedaan karena seseorang telah berbuat tindak pidana. Pencetus teori ini adalah Imanuel Kant yang mengatakan “ Fiat justitia ruat coelum” yang maksudnya walaupun besok dunia akan kiamat namun penjahat terakhir harus tetap menjalankan pidananya. Kant mendasarkan teori ini berdasarkan prinsip moral dan etika. Pencetus lain adalah Hegel yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah tantangan kepada hukum dan keadilan. Karena itu, menurutnya penjahat harus dilenyapkan. Sedangkan menurut Thomas Aquinas pembalasan sesuai dengan ajaran tuhan karena itu harus dilakukan pembalasan kepada penjahat. Jadi dalam teori ini adalah pembalasan itu ditujukan untuk memberikan sebuah hukuman kepada pelaku pidana yang mana nantinya akan memberikan efek jera dan ketakutan untuk mengulangi perbuatan pidana tersebut.¹¹

b. Teori Tujuan

¹¹Muladi & Barda Nawawi Arief. , Op.Cit, hlm. 23.

Berdasarkan teori ini, pemidanaan dilaksanakan untuk memberikan maksud dan tujuan suatu pemidanaan, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat perbuatan kejahatan tersebut. Dalam hal ini teori ini juga dapat diartikan sebagai pencegahan terjadinya kejahatan dan sebagai perlindungan terhadap masyarakat. Penganjur teori ini yaitu Paul Anselm van Feurbach yang mengemukakan “ hanya dengan mengadakan ancaman pidana pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan pemjatuhan pidana kepada si penjahat”¹² Dengan demikian dalam teori tujuan ini yang tertua adalah tero pencegahan umum yang mana didalamnya tertuang teori yang bersifat menakut – nakuti. Pengertian dari teori ini yaitu bahwa untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan atau suatu tindak pidana maka pelaku yang tertangkap harus diberikan sebuah hukuman, yang dimana nantinya hukuman itu sebagai sebuah contoh bahwa dengan berbuat tindak pidana mereka akan mendapatkan sebuah imbalan berupa hukuman sehingga mereka takut untuk berbuat perbuatan pidana tersebut.

c. Teori Gabungan

¹²Harkristuti Harkrisnowo. 2003. *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*. Orasi pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Balai Sidang Universitas Indonesia., hlm. 3.

Teori gabungan ini lahir sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teori relatif yang belum dapat memberi hasil yang memuaskan. Aliran ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat secara terpadu.⁸ Artinya penjatuhan pidana beralasan pada dua alasan yaitu sebagai suatu pembalasan dan sebagai ketertiban bagi masyarakat..¹³

Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib hukum didukung antara lain oleh Simons dan Vos. Menurut Simons, dasar primer pidana yaitu pencegahan umum dan dasar sekundernya yaitu pencegahan khusus. Dalam artian pidana primer ialah bertujuan pada pencegahan umum yang terletak pada ancaman pidananya dalam undang – undang, apabila hal ini tidak cukup kuat atau tidak efektif dalam hal pencegahan umum, maka barulah diadakan pencegahan khusus yang bertujuan untuk menakut – nakuti, memperbaiki dan membuat tidak berdayanya penjahat. Dalam hal ini harus diingat bahwa pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan undang – undang atau berdasarkan hukum dari masyarakat. Sedangkan menurut Vos berpendapat bahwa daya menakut – nakuti dari pidana terletak pada pencegahan umum yaitu tidak hanya pada ancaman pidananya tetapi juga pada penjatuhan pidana secara kongkrit oleh hakim. Pencegahan khusus yang berupa pemenjaraan masih dipertanyakan efektifitasnya untuk menakut – nakuti, karena seseorang yang pernah

¹³*Ibid.*

dipidana penjara tidak lagi takut masuk penjara, sedangkan bagi seseorang yang tidak dipenjara ia takut untuk masuk penjara. Jadi teori gabungan yang mengutamakan perlindungan dan tata tertib hukum ini dalam artian memberikan keadilan bagi para korban kejahatan demi melindungi hak hak mereka, dan untuk penat sendiri bertujuan memberikan efek jera agar tidak mengulangi perbuatan kejahatannya kembali

2. Teori Tugas dan Kewenangan Hakim

Hakim berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Menurut Sudarto tugas dan wewenang hakim sebagai seorang penegak hukum adalah mengadili perkara yang diajukan kepadanya. Seorang hakim dituntut untuk bertindak mengambil putusan berdasarkan rasa keadilan dan memperjuangkannya. Jika hakim melanggar kode etika, maka meskipun aparat keamanan negara bekerja profesional dengan peraturan yang lengkap, semuanya akan sia-sia.¹⁴

Kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang

¹⁴*Ibid.*

dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.¹⁵

Menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:

Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

F. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap fakta hukum yang ada dengan menganalisis

¹⁵H.R. Abdussalam dan DPM Sitompul, *Sistem Peradilan Pidana*, Restu Agung, Jakarta, 2011, hlm. 179.

untuk mengetahui pelaksanaan dan masalah-masalah yang timbul.¹⁶

Seperti pada, Putusan Nomor: 924 / Pid.B /2019 / PN.JMB.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ilmu hukum normatif banyak pendekatan yang dapat digunakan baik secara terpisah berdiri sendiri maupun secara kolektif sesuai dengan isu atau permasalahan yang dibahas. Pendekatan penelitian tersebut antara lain:

a. Pendekatan Undang-Undang (*statue approach*)

Ilmuan hukum menyebutnya dengan pendekatan yuridis, yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum Pendekatan undang-undang (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani lebih mengarahnya kepada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.serta Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Pendekatan undang-undang akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau undang-undang dengan regulasi. Hasil dari telaah merupakan sebuah argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.¹⁷

¹⁶Peter Mahmud Marzuki,*Metode Penelitian Hukum*. Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 141.

¹⁷*Ibid.*

b. Pendekatan Konseptual

Penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum dan sebagainya. Konsep hukum ini berada pada tiga ranah atau tataran atau sesuai tingkatan ilmu hukum itu sendiri yaitu tataran ilmu hukum *dogmatic*, tataran teori hukum dan tataran filsafat hukum. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin didalam ilmu hukum, peneliti akan mengemukakan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun sesuatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang di hadapi.¹⁸

c. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus (*Case Approach*) bertujuan untuk mengetahui penerapan norma atau kaidah hukum dalam praktik hukum.¹⁹ Pendekatan ini diperuntukan untuk mengetahui kaidah hukum

¹⁸*Ibid.*

¹⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, 1981, hlm. 10.

atau norma hukum yang diterapkan dalam kasus- kasus yang telah diputus baik oleh hakim maupun lembaga lain yang berwenang memutus suatu perkara.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, terdiri dari:

- 1) Norma Dasar yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Peraturan Perundang-Undangan
- 3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder

1. Buku-buku,
2. peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan,
3. Jurnal hukum
4. internet,
5. artikel dan lain-lain yang dapat digunakan sebagai literatur dalam penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier Bahan Hukum Tersier yaitu Bahan Hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Hukum.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis Bahan Hukum sebagai hasil dari pengumpulan bahan hukum yaitu suatu analisis dalam bentuk uraian-uraian yang menggambarkan permasalahan serta pemecahan secara jelas dan lengkap berdasarkan bahan hukum yang diperoleh. Analisis dilakukan dengan cara:

- a. Menginterpretasikan semua peraturan perundang-undangan sesuai masalah yang diteliti.
- b. Menilai bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- c. Mengevaluasi perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

G. Sistematik Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari pembahasan skripsi ini, maka perlu kiranya disusun secara sistematis. Adapun sistematika yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah terdiri dari 4 (empat) bab dari setiap bab tersebut diuraikan kembali dalam sub-sub yaitu bagian uraian lebih kecil dari skripsi ini. Semua bagian dari skripsi ini merupakan satu kesatuan antara yang satu dengan yang lainnya. Sistematika Penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan Bab ini merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, metode penelitian dan sistematika penulisan

BAB II : Tinjauan umum Tentang Disparitas Putusan Pidana, Pelaku tindak pidana, pencurian dengan pemberatan, Bab ini memuat tentang pengertian-pengertian, tujuan Disparitasi Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Dengan Pemberatan Berdasarkan

Pasal 363 Ayat (1) Angka 4 Dan 5 Kuhp Diwilayah Hukum
Pengadilan Negeri Jambi

BAB III : Bab ini merupakan bab yang berisikan tentang pembahasan mengenai Analisis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan berdasarkan putusan nomor 924/Pid.B/2019/Pn.Jmb.

BAB IV : Penutup Bab ini berisi : Kesimpulan yang berupa pernyataan atau jawaban langsung dari permasalahan yang dirumuskan pada bab pertama dan dibahas pada bab ketiga serta saran yang merupakan tanggapan dari identifikasi masalah.